

Cendekiawan dan Kebebasan Akademik

Imam Moedjiono

Dosen & PD III FIAI UII Yogyakarta

Salah satu hasil reformasi yang dapat dirasakan oleh segenap bangsa Indonesia adalah kebebasan berbicara. Pada puncaknya kebebasan berbicara tersebut sering diidentikkan dengan *euphoria*, karena kadar kebebasan tersebut terkadang dipandang melebihi ambang batas kewajaran. Hal tersebut tercermin pada fenomena kehidupan berbagai komunitas di tengah masyarakat Indonesia.

Sebagian masyarakat sangat merasakan kebahagiaan dengan adanya kebebasan berbicara, setelah merasa tercekam selama tiga puluh dua tahun. Akibatnya mereka memanfaatkan *aura* kebebasan berbicara tersebut secara optimal melalui berbagai media. Koran, majalah, tabloid, radio dan televisi mereka manfaatkan untuk mengekspresikan kebebasan berbicara tanpa takut dibredel atau dicabut izin siarannya.

Namun demikian ada pula sebagian masyarakat yang merasakan kekhawatiran mendalam, bahkan trauma, akibat adanya kebebasan berbicara, yang terkadang dirasakan telah melampaui batas kewajaran. Pernyataan-pernyataan yang sarkastis, caci-maki, bahkan hujatan terhadap kelompok tertentu yang disampaikan dengan *enjoy*, tanpa disadari telah merugikan gerakan reformasi itu sendiri, karena

di samping bersifat kontra produktif dan dapat disalah-tafsirkan dengan agitasi dan provokasi yang potensial membuahkan perusakan, pembakaran dan penjarahan fasilitas umum maupun harta milik pribadi kalangan etnis tertentu, juga memiliki potensi untuk mengarah kepada disintegrasi bangsa.

Insan-insan kampus yang dikenal sebagai lokomotif gerakan reformasi sering terkena getahnya. Berbagai implikasi negatif dari gerakan reformasi, seolah juga menjadi tanggung jawab insan kampus. Padahal mereka tidak lebih hanyalah merupakan kekuatan moral yang menyuarakan suara hati nurani masyarakat yang terbelenggu selama tiga dasa warsa.

Selama berlangsungnya gerakan reformasi, mahasiswa tidak jarang mendapat tuduhan negatif, bahwa seolah-olah mereka digerakkan oleh kekuatan politik tertentu, atau seolah ada yang mendalangi dan mendanainya. Kalau mau jujur, sebenarnya memang ada yang menggerakkan, yakni hati nurani, yang mendalangi adalah akal sehat, dan yang mendanai yakni tekad yang kuat untuk membebaskan bangsa dari penjarahan kemerdekaan berbicara, dan membebaskan dari tradisi kolusi, korupsi dan nepotisme.

Diakui atau tidak, mahasiswa yang merupakan kelompok termuda dalam jajaran cendekiawan (Arief Budiman, 1984:150) memiliki peran penting dalam setiap perubahan sosial politik di beberapa negara. Kesuksesan gerakan mahasiswa antara lain terlihat pada peristiwa penggulingan Juan Peron di Argentina tahun 1955, Perez Jimenez di Venezuela tahun 1958, dan Ayyub Khan di Pakistan 1969.

Di Indonesia dalam setiap episode gerakan yang berimplikasi pada perubahan sosial politik, senantiasa mendudukkan cendekiawan terutama mahasiswa dalam jajaran termuda kalangan cendekiawan, sebagai pemeran utama. Mulai dari gerakan Budi Oetomo yang merupakan cikal bakal kebangkitan nasional 1908, yang dimotori oleh para mahasiswa STOVIA. Gerakan KAMI 1966, yang berhasil memobilisir segenap potensi bangsa untuk meruntuhkan kekuatan Orde Lama yang tumbang bersama dengan lengsernya Bung Karno. Peristiwa MALARI 1974, dan gerakan reformasi yang menggulingkan Soeharto di tahun 1998 yang baru lalu, mahasiswa senantiasa berperan aktif bersama dengan segenap cendekiawan dan komponen masyarakat lainnya.

Tulisan berikut ini bermaksud untuk mengungkap masalah kebebasan cendekiawan dan kebebasan akademik, yang secara berurutan akan dimulai dari pembahasan tentang klarifikasi istilah cendekiawan, posisi cendekiawan, peranan cendekiawan, cendekiawan dan modernitas, cendekiawan dan fenomena kebebasan, klarifikasi istilah kebebasan akademik, cendekiawan dan kebebasan akademik, serta implementasi kebebasan akademik di Indonesia.

Klarifikasi Istilah Cendekiawan

Sebelum melanjutkan pembahasan, perlu dilakukan klarifikasi tentang istilah cendekiawan terlebih dulu, sehingga diketahui secara pasti siapa saja yang termasuk kategori cendekiawan. Apakah Cak Nun (EMHA Ainun Nadjib), Muhammad Sobari, Gunawan Mohammad, Gus Dur (KH. Abdurrahman Wahid), Mustofa Bisri, Mahbub Djunaidi, yang tidak memiliki ijazah kesarjanaan, tetapi mampu dan mau menunjukkan kemampuan nalar melalui karya tulis masing-masing secara produktif, untuk memberikan kecerahan kepada masyarakat, termasuk kategori cendekiawan? Apakah, Kosim Nurseha, dan Syukron Makmun, yang tidak bergelar sarjana tetapi selalu dirindukan jutaan umat, karena kemampuan mereka merangkai kalimat dan logika yang dikemas dalam bentuk fatwa yang dapat memberikan pencerahan kehidupan sosial keagamaan, dan selalu produktif melontarkan gagasan-gagasan aktual menyoroti persoalan sosial dengan memberikan alternatif solusi, dapat disebut sebagai cendekiawan? Apakah para guru besar yang memiliki keanggunan akademik tetapi telah kehilangan gairah meneliti dan menulis, masih termasuk kategori cendekiawan? Apakah para mahasiswa yang memiliki kegenitan intelektual rajin membaca, diskusi, meneliti, menerjemahkan karya besar tokoh dunia, menulis artikel dan buku semasa menjadi mahasiswa seperti Budhi Munawar Rahman, Syaiful Muzanni, AE Priono, Jenny DA, sudah layak dimasukkan kategori cendekiawan pada waktu itu? Apakah Romo Mangun yang memiliki latar belakang pendidikan arsitektur tetapi lebih banyak menekuni bidang sosial keagamaan dan budaya, atau Ir. Soekarno yang lulusan ITB tetapi lebih banyak aktif di

bidang politik dan birokrasi, atau para doktor yang meninggalkan "habitatnya" dan disibukkan dengan urusan bisnis, politik, dan birokrasi yang mungkin tidak terkait dengan bidang keilmuannya juga termasuk kategori cendekiawan?

Dalam ilmu-ilmu sosial, memang tidak mudah untuk membatasi suatu konsep sedemikian rupa, sehingga batasan itu mencakup kesepakatan umum di antara para ahli. Kesulitan yang sama muncul juga dalam memberikan batasan mengenai istilah cendekiawan. Banyak ahli yang telah mengemukakan definisi cendekiawan yang memiliki perbedaan redaksional, perbedaan sisi pandang atau perbedaan skala prioritas, tetapi *Oxford Learners Dictionary* memberikan batasan yang cukup representatif tentang cendekiawan (yang diistilahkan dengan *intellectual*) dengan "orang-orang yang mempunyai atau menunjukkan kemampuan nalar (*reasoning power*) yang baik, yang tertarik pada hal-hal rohani (*things of mind*) seperti kesenian, atau ide-ide demi seni atau demi ide itu sendiri, serta memiliki kemampuan untuk sungguh-sungguh berpikir bebas". Definisi tersebut setidaknya-tidaknya dapat mengeliminir kegamangan kita meskipun tidak dapat menjawab semua persoalan di atas secara *instant*.

Bagi Dody Tisna Amidjaja (1984:314), cendekiawan adalah pembaharu masyarakat yang terlatih untuk selalu berada dalam proses berpikir, dengan sikap dan cara pendekatan yang obyektif berdasar metode ilmiah, dan senantiasa mempertanyakan sesuatu dalam usaha mencapai kebenaran yang hakiki, sehingga terkadang mengesankan sebagai tukang mengkritik.

Definisi yang paling longgar telah diberikan Edward Shils yang menyatakan bahwa cendekiawan adalah seseorang yang memiliki

concern luas pada persoalan manusia, masyarakat, dan alam. Di samping itu cendekiawan juga dilukiskan sebagai tempat bersemayamnya "jiwa dan nurani" masyarakatnya. Hal ini paralel dengan yang dikemukakan oleh Theidor Geiger, "cendekiawan merupakan representasi semangat kreatif masyarakatnya. Akibatnya, peran politisnya ditentukan oleh relasi antara kekuasaan dan pemikiran" (Budi Irawanto, 1996:22).

Dalam hubungannya dengan masalah jenjang pendidikan cendekiawan, Shils juga terlihat fleksibel. Dia memasang standar yang berbeda untuk cendekiawan di negara maju dan di negara yang baru merdeka. Di negara maju Shils (1984:242-243) mensyaratkan ijazah perguruan tinggi sebagai syarat untuk menjalankan profesinya dan oleh karenanya ia layak disebut cendekiawan, tetapi di negara yang sedang berkembang atau negara yang baru saja merdeka atau bahkan belum merdeka, Shils tidak mensyaratkan pendidikan tinggi melainkan cukup pendidikan lanjut dan modern. Penggunaan istilah modern di sini dimaksudkan sebagai upaya penegasan bahwa yang dimaksudkan adalah lembaga pendidikan formal yang memiliki kurikulum standar, bukan lembaga pendidikan tradisional konvensional. Persyaratan ijazah bagi cendekiawan belakangan ini sudah tidak mendapat prioritas lagi, dan masyarakat lebih menekankan pada tingkat peranannya di tengah masyarakat, serta mentalitas dan moralitas ke cendekiawannya, bahkan Shils sendiri dalam catatan kakinya sudah mulai meragukan batasannya sendiri.

Posisi Cendekiawan

Ketika Plato mendeskripsikan tentang struktur dan komposisi ideal sebuah masyarakat, ia menempatkan keberadaan kaum cendekiawan

dalam posisi yang sangat penting dan sangat terhormat, layaknya posisi vital dalam anatomi tubuh manusia. Pada akhirnya bukan hanya Plato yang memberikan posisi terhormat bagi para cendekiawan.

Kalau ditelusuri secara sosiologis, keberadaan kaum cendekiawan ini dalam masyarakat juga memperoleh posisi strategis. Dalam struktur masyarakat Minangkabau misalnya, kelompok *cadiak pandai* sudah sejak lama memperoleh tempat dan melakukan perannya dalam masyarakat Minang. Demikian pula halnya dengan di Aceh yang menempatkan ulama atau cendekiawan pada posisi terhormat. Setidak-tidaknya didapati gambaran historis mengenai keberadaan golongan cendekiawan dalam komunitas kita sendiri. Kehadiran kaum cendekiawan senantiasa ditempatkan sebagai bagian *genuin* dalam masyarakat kita sendiri (Ahmad Fadilah, 1996:54).

Melihat keberadaan kaum cendekiawan ini dalam struktur sosial masyarakat kita, atau seperti yang diinginkan oleh Plato, memang tidak dapat dihindari adanya idealisasi. Cendekiawan adalah sosok manusia "beda" dibanding sosok yang lain dalam sebuah komunitas sebuah masyarakat tertentu.

Dalam perspektif Islam, cendekiawan juga memiliki posisi strategis. Secara tegas Alqur'an menyebut: "*yar fa'llahu lladziina aamanuu wal ladziina 'uutul 'ilma darajaat*", (Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman serta orang-orang yang berilmu pengetahuan/ cendekiawan).

Pada masyarakat dunia ketiga, cendekiawan selalu dikaitkan dengan agenda besar bangsa, karena kecendekiawanan tidak hanya melekat pada dunia akademis melainkan juga senantiasa melekat pada lingkungannya. Oleh karenanya kecendekiawanan seseorang harus memiliki bobot moral sosiologis, di samping

memiliki bobot ideal akademis. Kecendekiawan tidak hanya untuk dinikmati sendiri, tetapi melekat dengan tugas *social engeneering*, tujuan-tujuan bangsa, atau secara pragmatis diminta untuk berada secara dekat dengan persoalan praktis masyarakatnya.

Di masa lalu para resi menempati posisi para cendekiawan, sekalipun keduanya memiliki perbedaan. Para resi lebih menekankan pada penggunaan intuisi, karena intuisi mereka dapat berkembang secara sempurna. Para cendekiawan pada umumnya lebih mengandalkan potensi rasio, serta metode-metode ilmiah yang sering mereka praktekkan melalui berbagai eksperimen. Dalam kehidupannya resi lebih banyak menarik diri dari kehidupan ramai, dan lebih senang mengasingkan diri bahkan bertapa. Hal ini selaras dengan kecenderungannya untuk menggunakan intuisi, yang dapat diasah dengan bertapa. Cendekiawan tidak merasa perlu bertapa, dan justru merasa harus berada di tengah masyarakat, karena ilmunya memiliki fungsi sosial sehingga dengan sendirinya memiliki kewajiban moral untuk mengabdikan kemampuannya dan kecakapannya demi kemajuan masyarakat.

Melihat posisi sentral cendekiawan, maka sudah selayaknya jika masyarakat banyak menaruh harapan pada para cendekiawan untuk menganalisis persoalan sosial, menyaring informasi yang akurat, memberi penyadaran tentang hak-hak politik rakyat, hak-hak ekonomi, hak partisipasi dalam pembangunan sampai pada hak asasi manusia.

Keberpihakan para cendekiawan kepada kaum lemah di masyarakat, merupakan kearifan sikap cendekiawan. Sekalipun diakui belum semua cendekiawan memiliki kearifan yang tinggi. Menjamumnya LSM merupakan manifestasi kepedulian tersebut. Terlebih di era reformasi ini terlihat semangat tinggi dari sebagian

cendekiawan untuk melakukan pemberdayaan politik rakyat melalui kesediaannya untuk menjadi pengurus dan pimpinan orsospol, dan hal ini juga merupakan bentuk lain dari kepedulian dan keberpihakan para cendekiawan kepada kaum lemah. Di samping itu kesediaan mereka untuk aktif memikirkan kesulitan masyarakat dengan berupaya mencari solusi melalui berbagai cara, juga merupakan langkah dari para cendekiawan yang perlu mendapat acungan jempol. Sekalipun kita tidak dapat menutup mata adanya sebagian cendekiawan yang terlena dan selalu asyik dengan kesibukannya untuk mengurus keperluan pribadinya sendiri.

Peranan Cendekiawan

Ketika berbicara di Universitas Indonesia pada tahun 1957, Mohamad Hatta yang saat itu sudah menjadi mantan Wakil Presiden RI, menunjukkan kedudukan dan peranan kaum cendekiawan (disebutnya *inteligensia*) yang justru mengimplikasikan tanggung jawabnya, yaitu mencari dan membela kebenaran. Para cendekiawan memikul tanggung jawab besar karena kualitasnya sebagai kelompok terpelajar. Mereka memiliki kemampuan menguji yang benar dan yang salah, berdasar argumentasi keilmuannya. Ilmu, secara intrinsik mengandung nilai moral, dan oleh karena itu maka kaum cendekiawan juga memiliki tanggung jawab moral, selain intelektual.

Secara lebih tegas Hatta menunjukkan peran cendekiawan dengan: "memberi petunjuk dan memberi pimpinan kepada perkembangan hidup kemasyarakatan, dan bukannya menyerahkan diri kepada golongan yang berkuasa yang memperjuangkan kepentingan mereka masing-masing" (Dawam, 1996:VIII).

Sistem politik suatu negara sangat mewarnai peran cendekiawan. Pada masa penjajahan Belanda dengan sistem politik yang monolitik, para cendekiawan didesak oleh keadaan untuk mengambil peran di bidang politik untuk menentang kekuasaan asing dan membentuk kekuasaan baru yang bebas dari kekuasaan kolonial. Di sanalah tanggung jawab intelektual mereka, maka muncullah nama Soekarno, M. Natsir, Hatta, Tan Malaka, Sutan Syahrir dan lain sebagainya. *Walhasil* tidak sedikit dari kaum intelektual radikal pada masa penjajahan yang kemudian berubah menjadi elite politik pada masa kemerdekaan. Demikian juga halnya pada saat terjadi perubahan dari orde lama ke orde baru, atau dari orde baru ke era reformasi.

Banyak contoh pahit tentang peranan cendekiawan yang hidup dalam sistem politik yang otoriter. Daniel Cosío Villegas, seorang pengamat politik Meksiko menyatakan bahwa para presiden dalam sejarah Meksiko selalu tergantung kepada para cendekiawan, tetapi bukan untuk memberi saran atau masukan, melainkan untuk mempersiapkan argumentasi bagi keputusan yang sudah diambil sebelumnya. Contoh lain yang terjadi di Argentina sebagaimana yang dikemukakan oleh Yulio Cortazar, tentang nasib pahit cendekiawan di negerinya bahwa sepanjang sejarah para cendekiawan selalu diperalat negara dan menjadi korban (Budi Irawanto, 1996:19).

Kedua contoh di Amerika Latin tersebut menjadi contoh pahit dari peran cendekiawan di tengah masyarakatnya. Mereka tidak lagi memiliki *privilege* berdiam di menara gading, tetapi terlibat langsung dalam sistem kekuasaan. Inilah sesungguhnya implikasi politis dari cendekiawan dalam banyak negara dunia ketiga. Tampaknya memang tidak mungkin bagi cendekiawan di

dunia ketiga untuk bersikap "apolitis". Barangkali ini termasuk resiko dari posisinya yang senantiasa menjadi juru bicara bagi penegakan kebenaran dan keadilan.

Dalam sejarah Indonesia cendekiawan hampir selalu diagungkan dan selalu berada pada posisi terhormat. Mereka dianggap mempunyai peran yang menentukan dalam gerak sejarah. Namun demikian peran mereka dipengaruhi oleh posisi mereka dalam hubungan dengan pemerintah. Ada yang berada pada posisi berdampingan dan ada pula yang berhadapan. Para cendekiawan yang berada pada posisi berdampingan berperan sebagai pemberi *entri point*, *prediktor*, *problem solving* hingga *evaluator*, sedangkan bagi cendekiawan yang berada di luar sistem ada yang menjadi analis, kritikus, bahkan oposan.

Dalam posisi berhadapan dengan kekuasaan yang represif, cendekiawan sulit menampik kewajiban moral, dan intelektual untuk menyuarakan kebenaran, dan memperjuangkan kebebasan. Apalagi represi yang dilakukan secara telanjang seperti yang dilakukan masa kolonial, orde lama dan orde baru pada episode tertentu, maka lahirlah istilah "non kooperatif" di zaman kolonial bagi kaum cendekiawan yang alergi terhadap sistem politik kolonial. Dalam setiap episode sejarah bangsa selalu diwarnai oleh polarisasi cendekiawan seperti itu. Bahkan di awal era reformasi juga terlihat kecenderungan polarisasi cendekiawan yang ingin berperan dalam sistem seperti Amin Rais, Yusril Ihza Mahendra, Didin Hafidudin dan lain sebagainya. Tetapi ada juga yang ingin berperan bebas di luar sistem seperti Nurcholis Madjid misalnya.

Cendekiawan di Tengah Modernitas

Setidak-tidaknya ada tiga premis nilai modernitas yang dapat ditarik benang merah dengan keberadaan kaum cendekiawan (Budi Hardiman, 1996:94). Pertama, sosok manusia modern seharusnya mengutamakan kesadaran diri sebagai subyek yang memperhatikan persoalan hak-hak individu, otonomi pribadi, serta kesadaran hidup berdemokrasi. Bagi seorang cendekiawan, hal-hal tersebut merupakan bagian dari tugasnya untuk mensosialisasikan nilai-nilai kepada segenap warga masyarakat melalui media pendidikan maupun media massa.

Kedua, sosok manusia modern seharusnya bersikap kritis. Sikap ini juga melekat pada cendekiawan. Seorang cendekiawan senantiasa dituntut untuk bersikap kritis dalam menghadapi berbagai persoalan yang muncul di masyarakat. Kenyataan menunjukkan bahwa warga masyarakat pada umumnya sering menunggu respon para cendekiawan di dalam menghadapi setiap persoalan baru. Dengan kalimat lain cendekiawan difungsikan sebagai barometer masyarakat. Jadi, sekalipun cendekiawan memiliki kebebasan dalam menentukan sikap termasuk dalam mengkritisi segala sesuatu, tetapi hendaknya senantiasa memperhitungkan setiap langkahnya, karena jejaknya akan diikuti oleh anggota masyarakat awam yang lain. Sikap kritis seorang cendekiawan bukan sikap yang tercermin melalui kritik yang dilontarkan tanpa dasar dan tanpa tahu mengarah mana (*nihilisme*), melainkan bersifat konstruktif, dalam arti mengarah kepada kemajuan dan memberi substansi positif tertentu pada masa depan. Dengan kata lain kritik mengandung dimensi normatif utopis yang wajar dalam kehidupan sosial.

Ketiga, sosok manusia modern memiliki kecenderungan untuk bersikap progresif, sehingga senantiasa mengadakan perubahan yang secara kualitatif meningkat, minimal baru. Kaum cendekiawan pada umumnya senantiasa *concern* untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, di samping memiliki kesadaran perlunya melakukan transformasi sosial, dalam rangka memajukan kehidupan bangsanya.

Dengan mencari kesejajaran antara premis-premis nilai modernitas dan praksis emansipatoris kecendekiawanan, kita dapat ditemukan unsur-unsur universal yang melandasi modernitas. Namun satu hal yang perlu diingat, bahwa modernitas bukan satu-satunya sarana transformasi nilai dan identitas. Agama dan tradisi telah lama mendarah-daging dalam pergumulan kehidupan masyarakat yang juga memiliki nilai-nilai dan identitas yang ditransformasikan olehnya. Di sinilah kecendekiawan seorang cendekiawan akan teruji, dan ujian seperti inilah yang dapat menjadi eskalasi kecendekiawannya.

Di dalam sebuah buku yang berjudul *"The Shaping of Modern Mind"* sebagaimana dikutip oleh Taufik Abdullah (1984:307) pada kalimat pertama berbunyi: "manusia selalu hidup dalam zaman modern". Kalimat tersebut mengindikasikan bahwa manusia tidak pernah terlepas dari ide kekinianannya. Setiap manusia yang lahir di dunia ini senantiasa merasa bahwa ia hidup pada zaman yang paling modern, minimal lebih modern dibanding orang yang hidup sebelumnya. Namun demikian pada umumnya mereka juga menyadari adanya heterogenitas tingkat modernitas manusia yang hidup dalam masa yang sama pada tempat yang berbeda. Untuk mengejar ketertinggalan atau untuk mengantisipasi kemajuan di masa yang akan datang, maka masyarakat mempercayakannya kepada para cendekiawan.

Dalam proses peralihan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang modern, cendekiawan dipercaya untuk menjadi pandu atau pelopor yang bertugas memandu anggota masyarakat yang lain. Kepercayaan masyarakat tidaklah berlebihan, karena mereka dipandang telah memiliki seperangkat ilmu, teori dan metode yang telah mereka kuasai. Kepercayaan ini pulalah yang memacu motivasi para cendekiawan untuk secara terus-menerus bekerja keras, bereksperimen, berkarya melalui proses imitasi dan inovasi, sehingga melahirkan karya-karya nyata yang dapat membantu memudahkan dan meringankan kehidupan masyarakat.

Cendekiawan di Tengah Fenomena Kebebasan

Belakangan ini aura kebebasan telah menyusup dan merambah ke hampir semua lini kehidupan. Para pejabat yang biasanya dikenal sebagai komunitas paling takut berbicara kritis lantaran takut resiko lepasnya jabatan dan oleh karenanya merasa harus hati-hati berbicara, tiba-tiba berubah drastis menjadi sosok pemberani berbicara kritis di mana saja, kapan saja, dan mengkritik siapapun juga, tidak terkecuali mantan atasannya bahkan dengan berlagak seperti seorang tokoh mahasiswa reformis iapun memiliki keberanian berorasi dengan menghujat mantan presidennya yang biasanya paling ditakuti dan dimuliakannya.

Pers yang di masa orba terpasung dan terkooptasi oleh penguasa, tiba-tiba menemukan jati-diri di era reformasi ini. Akibatnya terjadi *booming* koran, majalah, dan tabloid. Artikel dan beritanya pun jauh lebih transparan, bebas untuk mengkritik, menyodok bahkan menghujat sana-sini, tanpa rasa risih dan tidak pernah dihantui

oleh rasa takut untuk dibredel seperti di masa orba.

Rakyat yang biasanya bersikap santun (untuk tidak mengatakan apatis), tiba-tiba berubah menjadi dinamis, kritis bahkan ada yang berubah menjadi kehilangan kesantunan, meneriakan teriakan-teriakan yang sarkastis, yang tidak pernah mereka teriakan di masa orba. *Euphoria* massa rakyatpun pada saat-saat tertentu terkadang ada yang mengarah pada hal yang negatif dan mengkristal menjadi perusakan, pembakaran, penjarahan, pembunuhan, bahkan kerusuhan.

Mahasiswa yang selama bertahun-tahun terkooptasi oleh sistem, yang secara internal melalui konsep NKK/BKK maupun SMPT, dan secara eksternal melalui sikap represif aparat keamanan, berubah menjadi sosok berbeda. Mereka meneriakan ketidak-adilan dan ketimpangan sosial, mengutuk kekuasaan absolut rezim orde baru, membeberkan praktik-praktik monopoli dan oligopoli. Mereka menuntut diberantasnya korupsi, kolusi serta nepotisme, dan dalam memperjuangkan idealisme, mereka tidak merasa takut kepada aparat keamanan.

Dari serangkaian fenomena kebebasan di atas, ada satu benang merah yakni kebebasan berbicara. Kebebasan berbicara adalah kategori umum yang melibatkan seluruh anggota masyarakat. Kebebasan berbicara dapat dilukiskan sebagai hak semua orang atau kelompok untuk mengungkapkan diri serta menebarkan opini tanpa rasa takut terhadap konsekuensi logis yang akan diterimanya. Namun harus dipahami bahwa kebebasan tersebut sebenarnya masih berada di bawah pengawasan hukum dan peraturan tertentu, sehingga kebebasan berbicara tidak dapat dimaknai dengan kebebasan untuk memfitnah, menghujat, mendiskreditkan, atau menyerang kelompok lain

yang berbeda pandangan, faham, ras, suku, dan agama, dengan alasan apapun.

Kenyataan menunjukkan, bahwa lokomotif pembaharuan di Indonesia yang menggunakan label reformasi, adalah insan-insan kampus terutama mahasiswa. Adanya beberapa implikasi negatif seperti perusakan, pembakaran, dan penjarahan, rupanya tidak dapat dilepaskan begitu saja dari tanggung jawab lokomotif reformasi. Akibatnya keharuman nama mahasiswa juga sedikit tercemar karenanya. Namun demikian hal tersebut tidak membuat surut langkah para reformis, karena masyarakatpun mengetahui secara pasti bahwa penggerak dan pelaku perusakan, pembakaran dan penjarahan adalah bukan unsur mahasiswa.

Aura kebebasan yang merebak era reformasi, sesungguhnya merupakan peluang bagi para cendekiawan untuk melakukan optimalisasi peran untuk berkarya dan berinovasi dalam lapangan keilmuan masing-masing. Di samping itu para cendekiawan tidak lagi terkungkung dalam bingkai-bingkai yang menghambat kreativitasnya. Namun demikian para cendekiawan juga berperan sebagai pembimbing masyarakat dalam memberikan kesadaran hukum dan sekaligus sebagai panutan dalam menaati rambu-rambu hukum. Bagaimanapun, di era reformasi ini supremasi hukum harus ditegakkan. Di sinilah peran cendekiawan sangat diharapkan. Masyarakat harus dididik bahwa kebebasan yang ada memiliki batas-batas tertentu, dan batas-batas itu adalah rambu hukum.

Klarifikasi Istilah Kebebasan Akademik

Kebebasan akademik pada hakekatnya merupakan kebebasan seseorang yang terlibat

dalam dunia akademik –para dosen, mahasiswa, atau civitas akademika– untuk mewujudkan kebebasan badan atau lembaga akademi. Russel Kirk, seorang budayawan konservatif menyatakan definisi yang diberikan WY Couch tentang kebebasan akademik adalah definisi yang terbaik yang pernah ditemuinya. Couch mengatakan bahwa kebebasan akademik adalah: “Prinsip yang dirancang untuk melindungi guru dari aneka bahaya (resiko) yang cenderung mencegah atau menghambat kewajiban yang ia pikul di tengah medan pencarian kebenaran” (Kirk, 1955:1).

Gambaran yang lebih jelas diberikan oleh Altwajri (1997:35) yang mentutip *Encyclopedia of Religion* yang menjelaskan bahwa dalam kebebasan akademik, “...tidak ada pembatasan, hukuman dan intimidasi berkaitan dengan kegiatan tradisional insan akademik, terutama yang menyangkut studi dan penelitian yang dilakukan, atau di dalam mengutarakan pandangan, hasil-hasil temuan dan opini yang diyakini, baik melalui lisan atau publikasi, betapapun dianggap usang ataupun bercorak subversif, bijaksana ataupun kolot”.

Mencermati beberapa definisi di atas, diperoleh kesan betapa luasnya cakupan kebebasan akademik, dan betapa luasnya wilayah “kekuasaan” cendekiawan. Namun demikian pada tahun 1960-an muncul persoalan-persoalan kontroversial seputar masalah kebebasan akademik yang menyangkut beberapa prinsip sebagai berikut:

1. Apakah seorang cendekiawan itu bebas meneliti, menulis, mengajar dalam bidang keahliannya di kampus secara tak terbatas tanpa persyaratan tertentu?
2. Apakah sang cendekiawan itu memiliki kebebasan yang sama untuk mengemukakan bidang keahliannya sebagaimana di dalam

kampus, sekiranya hal itu dilakukan di masyarakat di kalangan awam di luar kampus?

3. Apakah seorang cendekiawan itu bebas berbicara di kelasnya di kampus mengenai isu kontroversial, yang berada di luar bidang keahliannya, dan kemudian mengambil langkah keputusan untuk hal itu?
4. Apakah sang cendekiawan itu bebas menulis dan bebas berbicara kepada masyarakat awam mengenai isu yang kontroversial kemudian mengambil langkah yang sesuai untuk pendapatnya itu? (Ihsan, 1985:65).

Cendekiawan dan Kebebasan Akademik

Perguruan tinggi memiliki kebebasan akademik untuk melaksanakan fungsinya tanpa dicampuri oleh kekuasaan, sehingga para cendekiawannya dapat bergerak dengan leluasa sekalipun tetap berada dalam frame hukum yang berlaku, karena bagaimanapun cendekiawan harus menegakkan supremasi hukum.

Di samping itu, perguruan tinggi juga memiliki kebebasan mimbar akademik yang menjamin kebebasan para cendekiawan di dalam suatu perguruan tinggi untuk belajar, mengajar dan melaksanakan penelitian serta mengemukakan pendapatnya sehubungan dengan kegiatan tersebut, tanpa ada pembatasan kecuali dari dirinya sendiri (Ihsan, 1985:49).

Jika sebuah universitas memiliki cendekiawan yang berkemampuan intelektual tinggi, yang selalu ingin tahu dan kreatif, maka akan selalu muncul gagasan baru yang dicetuskannya, yang mungkin akan berbeda dengan pandangan dan keyakinan para pemimpin di masyarakat, baik pimpinan keagamaan maupun pemerintahan.

Oleh karenanya, sepanjang perjalanan sejarah tidak jarang terlihat adanya tekanan penguasa untuk membatasi kebebasan mengemukakan pendapat oleh cendekiawan tertentu. Penekanan tersebut ada yang dilakukan secara halus dan persuasif, tetapi tidak jarang pula dilakukan dengan cara kasar dan represif, bahkan ada yang sampai menelan korban jiwa.

Pada masa abad pertengahan, lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang kuat dan agresif telah menjadi "tuan-tuan" yang memiliki dan memanfaatkan hak menggunakan kebebasan untuk mengemukakan gagasan yang aneh-aneh sampai yang "tak masuk akal", kebebasan untuk tetap atau berubah pendapat tentang suatu kebenaran. Dengan kebebasan tersebut, mereka telah memenangkan suatu tingkat kebebasan filosofis yang tidak dimiliki dan tidak terdapat pada komunitas masyarakat lainnya pada waktu itu. Bahkan insan-insan kampus memiliki kebebasan yang luas sekali sehingga benar-benar memiliki *self confidence* yang berlebihan. Akibatnya muncullah eksekusi pengkultusan terhadap profesor tertentu oleh kelompok-kelompok penganutnya, yang tanpa disadari telah melakukan *taklid* buta terhadap pandangan profesor tertentu. Hal inilah yang akhirnya membentuk kebekuan iklim intelektual.

Keadaan yang kurang sehat tersebut menimbulkan reaksi dari luar kampus, terutama dari pihak gereja dan pemerintah, yang untuk kepentingan stabilitas tidak dapat menerima dan membiarkan begitu saja keadaan yang anarkhistik berlangsung terus menerus. Akibatnya secara bertahap universitas semakin ditempatkan di bawah pengawasan, sehingga gagasan apapun yang muncul di perguruan tinggi selalu dipantau dan diikuti dengan seksama, kemudian diarahkan dan kalau perlu disensor sebelum dipublikasikan kepada masyarakat luas.

Rentang waktu antara abad pertengahan yang penuh dengan kejayaan kebebasan itu sampai abad ke-19, telah menunjukkan hilangnya kebebasan yang pernah dimiliki oleh universitas. Pada masa awal abad ke-19 konsepsi Jerman "*lehrfreiheit*" –kebebasan profesor untuk mengadakan penelitian dan mengajarkan hasil-hasil penelitian tanpa adanya pembatasan-pembatasan yang mencampuri kewenangannya– telah mulai dikenal di Inggris dan di Amerika Utara.

Konsep tersebut merupakan gagasan untuk memberikan kebebasan dan status kepada para dosen dan guru sebagai kelompok profesional, dan hal tersebut telah disambut dengan penuh antusias di pelbagai kampus. Tetapi interpretasi dan penerapannya ternyata sangat berbeda-beda di antara universitas di Inggris, Kanada dan Amerika (Ihsan, 1985:52).

Implementasi Kebebasan Akademik di Indonesia

Di Indonesia masalah kebebasan akademik telah ditempatkan pada posisi yang relatif proporsional, karena telah mendapat jaminan yuridis sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi, terutama pada Bab VI tentang kebebasan akademik dan otonomi keilmuan (Soenjono, 1991:48).

Kebebasan akademik di Indonesia dipandang sebagai kebebasan yang dimiliki oleh sivitas akademika untuk secara bertanggungjawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Dalam pengertian ilmu pengetahuan, tercakup pula ilmu pengetahuan tentang kesenian dan dalam

pengertian teknologi mencakup pula teknologi yang diterapkan.

Pimpinan perguruan tinggi mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.

Dalam melaksanakan kegiatan akademik, setiap anggota sivitas akademika harus mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya tidak merugikan pelaksanaan kegiatan akademik perguruan tinggi yang bersangkutan. Di samping itu, dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik setiap anggota sivitas akademika harus bertanggungjawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

Dalam melaksanakan kegiatan akademik dalam rangka kebebasan akademik pimpinan perguruan tinggi dapat mengizinkan penggunaan sumber daya perguruan tinggi, sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan untuk merugikan pribadi lain dan semata-mata untuk memperoleh keuntungan materi bagi yang melaksanakannya.

Kebebasan mimbar akademik di Indonesia berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat di perguruan tinggi yang bersangkutan sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan. Kebebasan mimbar akademik dilaksanakan dalam pertemuan ilmiah dalam bentuk seminar, ceramah, simposium, diskusi panel dan ujian dalam rangka pelaksanaan pendidikan akademik dan profesional. Kebebasan mimbar akademik dapat dilaksanakan di luar perguruan tinggi sepanjang tempat tersebut dapat dianggap bagian

sementara dari perguruan tinggi yang bersangkutan.

Perguruan tinggi dapat mengundang tenaga ahli dari lain perguruan tinggi yang bersangkutan untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik.

Pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik di Indonesia diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan nasional. Dalam merumuskan pengaturan pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, senat perguruan tinggi berpedoman pada ketentuan yang ada (Barthos, 1992:33).

Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufik, "Cendekiawan dan Pembaharuan", dalam *Cendekiawan dan Politik*, LP3ES, Jakarta, 1984.
- Altawjri, Ahmed, *Islam, Barat dan Kebebasan Akademis*, penerjemah Mufid, Titian Ilahi Pres, Yogyakarta, 1997.
- Barthos, Basir, *Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 1992.
- Budiman, Arief, "Peranan Mahasiswa sebagai Inteligensia", dalam *Cendekiawan dan Politik*, Aswab Mahsin, LP3ES, Jakarta, 1984.
- Fadhillah Ahmad, "Cendekiawan dan Tugas Penyadaran", dalam *Kebebasan Cendekiawan*, Masika (ed), Pustaka Republika, Jakarta, 1996.
- Kirk, Russel, *Acemic Freedom: An Essay in Definition*, Henry Regnery Companion, Chicago, 1955.

- Ihsan, Achmad, *Mahasiswa dan Kebebasan Akademik*, YP2LPM, Malang, 1985.
- Irawanto, Budi, "Cendekiawan dan Kekuasaan: Sebuah Ziarah pada Kebebasan". dalam *Kebebasan Cendekiawan*, Masika (ed). Pustaka Republika, Jakarta, 1996.
- Rahardjo, Dawam, "Cendekiawan Indonesia. Masyarakat dan Negara: Wacana Lintas Kultural", dalam *Kebebasan Cendekiawan*. Masika (ed), Pustaka Republika, Jakarta, 1996.
- Shils, Edward, *Etika Akademis*, Penerjemah, Agus Nugroho, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993.
- Soenjono, Dardjo Widjojo, *Pedoman Pendidikan Tinggi*, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 1991.
- Tisnaamidjaja, Doddy, "Cendekiawan dan Pembaharuan", dalam *Cendekiawan dan Politik*, Aswab Mahasin (ed), LP3ES, Jakarta, 1994.